

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis manajemen pemerintahan dalam implementasi prinsip *Good Governance* di Kantor Kecamatan Kawali yang dianalisis melalui aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam manajemen pemerintahan di Kantor Kecamatan Kawali pada dasarnya telah berjalan cukup baik melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada aspek perencanaan, pemerintah kecamatan telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan melibatkan unsur Muspika, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Hasil Musrenbang tersebut juga telah dimuat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Pada aspek pengorganisasian, struktur organisasi dan pembagian tugas aparatur telah tersusun sesuai ketentuan yang berlaku. Pada aspek pelaksanaan, pelayanan publik telah dilaksanakan sesuai prosedur administrasi pemerintahan. Sementara pada aspek pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan telah dilakukan melalui laporan kegiatan dan rapat koordinasi internal. Namun demikian, penerapan prinsip *Good Governance* masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat

keterbatasan pada aspek transparansi informasi, partisipasi masyarakat, efektivitas koordinasi internal, serta pengawasan yang masih cenderung bersifat administratif.

2. Faktor-faktor yang mendukung implementasi *Good Governance* di Kantor Kecamatan Kawali meliputi adanya komitmen pimpinan dan aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik, struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, serta adanya regulasi dan prosedur kerja yang menjadi pedoman pelaksanaan pemerintahan. Sementara itu, faktor-faktor yang menghambat implementasi *Good Governance* meliputi keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi internal antar-seksi yang belum optimal, pemanfaatan teknologi informasi yang masih terbatas, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pengawasan, serta sistem pengawasan yang masih lebih berfokus pada administrasi dibandingkan evaluasi berbasis kinerja dan kualitas pelayanan.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Kawali dalam meningkatkan penerapan prinsip *Good Governance* dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang dan koordinasi dengan pemerintah desa dalam proses perencanaan, pembagian tugas aparatur sesuai struktur organisasi, pelaksanaan pelayanan publik sesuai prosedur administrasi, peningkatan koordinasi internal, monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan, serta penerimaan masukan masyarakat terhadap pelayanan publik. Namun demikian, upaya tersebut masih belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan karena masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia,

belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, koordinasi internal yang belum efektif, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan yang masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem koordinasi, peningkatan keterbukaan informasi publik, serta pengembangan sistem pelayanan dan pengawasan yang lebih partisipatif agar penerapan *Good Governance* di Kantor Kecamatan Kawali dapat berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Manajemen Pemerintahan Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Kantor Kecamatan Kawali, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kecamatan Kawali, khususnya Camat Kecamatan Kawali disarankan untuk :
 - a. Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pemerintahan, khususnya dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Informasi mengenai program, prioritas pembangunan, serta hasil perencanaan perlu disampaikan secara lebih terbuka kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami dan ikut terlibat dalam proses pembangunan.
 - b. Meningkatkan keterbukaan dan sinkronisasi hasil perencanaan pembangunan dengan memastikan hasil Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) dimuat dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan terarah.

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan informasi pelayanan yang lebih jelas kepada masyarakat. Pemerintah kecamatan perlu mengembangkan sistem informasi pelayanan, memperjelas prosedur dan persyaratan pelayanan, serta meningkatkan kemampuan aparatur dalam penggunaan teknologi agar pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
 - d. Memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat secara lebih aktif. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui laporan administratif, tetapi juga melalui evaluasi berbasis kinerja dan kepuasan masyarakat. Selain itu, perlu disediakan mekanisme pengaduan masyarakat yang terbuka, terdokumentasi, dan mudah diakses agar masyarakat dapat memberikan masukan terhadap pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan secara langsung.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* di tingkat pemerintahan kecamatan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan menggunakan pendekatan penelitian yang lebih variatif agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam.